

**PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014)**

**Nicola Putra Pratama**

**Dwiatmanto**

**Rosalita Rachma Agusti**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya  
125030400111072@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research is conducted on the basis of the debate about the influence of macroeconomic variables such as inflation, and fiscal policy on income tax revenue. The type of research use explanatory research with quantitative approach. This research uses monthly data from 2010 to 2014 with sample of 50 time series data. Sources of the data used in this research is secondary data derived come from documentation of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara and Badan Pusat Statistik Kota Malang, as well as the type of data used are secondary data. The data analysis technique used for this research is multiple linear regression with dependent variable is income tax revenue and independent variable is inflation, tax audit and tax payers. The result of study reveal that variable of tax audit and rax payers have a significant effect on income tax revenue, whereas the variable of inflation has no significant effect on income tax revenue. Result of the study simultaneously with independent variable is inflation, tax audit and tax payers have a significant effect on income tax revenue with the ability of independent variables in explaining the dependent variable by 19%.*

**Keywords:** *Inflation, Tax Audit, Tax Payers, Income Tax Revenue*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan atas dasar perdebatan mengenai pengaruh variabel ekonomi makro seperti inflasi, dan kebijakan fiskal terhadap penerimaan pajak penghasilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data bulanan mulai tahun 2010 sampai 2014 dengan sampel sebesar 50 buah data runtut waktu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Badan Pusat Statistik Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas adalah penerimaan pajak penghasilan dan variabel bebas adalah inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian secara simultan variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 19%.

**Kata Kunci:** *Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan*

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang (Suandy, 2011:8). Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan yang merata di masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan sektor perpajakan. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

(APBNP) tahun 2015 mencatat penerimaan di sektor perpajakan menyumbang sebesar 74,2% dari sumber penerimaan dalam negeri (Kementerian Keuangan,2015:1-7). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat bergantung terhadap penerimaan di sektor perpajakan.

Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut APBN dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak

lainnya. Salah satu penerimaan di sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi adalah Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (dalam miliar rupiah)**

Tahun	Realisasi Pajak Penghasilan	Kontribusi terhadap Pajak
2010	357.045	49,36%
2011	431.122	49,33%
2012	513.650	50,54%
2013	506.443	47,01%
2014	546.170	47,62%

Sumber: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2015)*

Penerimaan pajak yang selalu naik tidak berbanding lurus dengan *tax ratio* negara Indonesia. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya dengan cara membandingkan jumlah pajak yang diterima dengan jumlah PDB suatu negara (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:83). Indonesia hanya menempati urutan 4 dari 5 negara tetangga yang berasal dari Asia Tenggara (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan negara Indonesia termasuk termasuk rendah apabila dibandingkan negara tetangga sehingga diperlukan beberapa arah kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015:2-16). Salah satu implementasi arah kebijakan tersebut adalah perbaikan dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Implementasi arah kebijakan ini nantinya akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui unit kerjanya, salah satunya berada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yang bertugas secara langsung dalam menangani Wajib Pajak. KPP Pratama Malang Utara memiliki penerimaan pajak sebagai berikut:

**Tabel 2 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara Periode 2010-2014**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	12,556	12,736	101,4%
2011	27,247	24,246	88%
2012	25,848	28,273	109%
2013	33,762	29,251	86,6%
2014	38,809	32,795	84,5%

Sumber: *KPP Pratama Malang Utara (2015)*

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015:2-5)

Perbaikan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar (Nasution, 2013:4). Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010:247).

Perbaikan selanjutnya yaitu dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang dimaksudkan untuk menunjang penerimaan negara adalah kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Soemitro dalam Rahayu, 2010:90). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak akan bertambah sehingga pertambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga semakin bertambah.

Selain faktor-faktor kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan, ada pula faktor diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Faktor eksternal tersebut dapat berupa faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, harga minyak internasional, produksi mentah minyak internasional dan tingkat suku bunga (Djati dalam Tresno dkk, 2011:4). Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian suatu negara adalah faktor inflasi yang cenderung fluktuatif. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga barang secara umum sehingga inflasi akan mempengaruhi impor suatu negara berkembang

lebih cepat namun perkembangan ekspor suatu negara akan melambat karena barang impor jauh lebih murah (Sukirno, 2010:423). Impor tersebut dapat membebani sektor usaha yang memaksa mereka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya sehingga dapat menyebabkan sektor individu maupun sektor usaha kehilangan penghasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor dari ketiga variabel tersebut dengan judul “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014”

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keynes

Menurut Putong (2009:404), “Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dengan memfokuskan bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan (I) lebih besar dari jumlah barang yang tersedia (S)”. Implikasi dari teori ini adalah Keynes memiliki pandangan bahwa untuk menjamin perekonomian yang stabil diperlukan peranan pemerintah seperti mengendalikan kebijakan fiskal di bidang perpajakan dan menekan pengeluaran pemerintah.

### Teori Pertumbuhan Neo Klasik Solow

Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik diungkapkan oleh Solow tahun 1970, yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi adalah adanya unsur pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005:67). Implikasi dari teori ini adalah pemanfaatan pertumbuhan penduduk sebagai suatu sumber daya yang positif akan berdampak positif pula bagi pendapatan suatu negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.

### Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:74) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Berdasarkan pengertian dari ahli maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas semua penghasilan yang diterima pada tahun pajak dan yang diperhitungkan

apabila penghasilan yang diterima melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

### Inflasi

Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa “inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus”

Menurut Nopirin dalam Natsir (2014:253), “Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum inflasi adalah:

1. Kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga suatu barang
2. Kenaikan bersifat umum
3. Kegiatannya berlangsung secara terus menerus

### Pemeriksaan Pajak

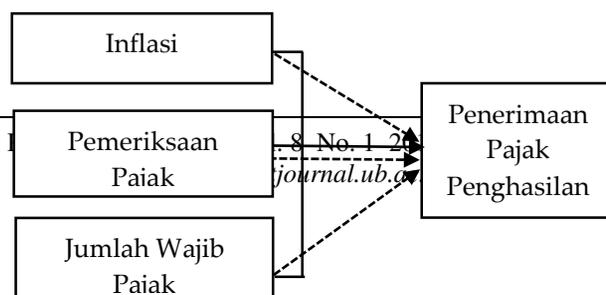
Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip Waluyo (2011:64), “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, maka pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai:

1. Kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data dan keterangan lainnya
2. Bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak
3. Dilaksakan dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan

### Model Hipotesis

Penelitian ini nantinya akan memberikan suatu jawaban apakah menerima atau menolak suatu hipotesis yang telah diberikan dalam penelitian (Sugiyono, 2011:64). Berdasarkan uraian dan teori yang telah dijabarkan, maka dapat diberikan gambaran hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1 Model Hipotesis**

Sumber: Data diolah (2016)

Keterangan:

- : Pengaruh Simultan
- : Pengaruh Parsial

H<sub>1</sub>: Variabel inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H<sub>2</sub>: Variabel inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian menggunakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengujian hipotesis (Singarimbun dan Efendi, 2011:7). Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan data dokumentasi dari KPP Pratama Malang Utara dan data kepustakaan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian dilakukan selama kurun waktu 5 tahun secara bulanan. Data tersebut berupa data penerimaan pajak penghasilan pasal 25 (Y), data penerbitan SKP sesuai dengan produk hukum dari kegiatan pemeriksaan pajak (X<sub>2</sub>), data penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan (X<sub>3</sub>) serta data inflasi bulanan yang diterbitkan oleh BPS Kota Malang (X<sub>1</sub>).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 buah data (5tahun X 12bulan), namun karena data yang diperoleh terdeteksi outlier sehingga data yang diperoleh adalah 50 buah data. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2011:112). Maka sampel yang diperoleh sejumlah 50 buah data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, dan uji hipotesis berupa uji F, uji t serta koefisien determinasi melalui bantuan software SPSS 16.0 (Ghozali, 2013:98).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nya sebesar 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi ≤ taraf nyata maka H<sub>1</sub> maupun H<sub>2</sub> diterima namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu nilai signifikansi ≥ taraf nyata maka H<sub>1</sub> maupun H<sub>2</sub> ditolak (Ghozali, 2013:98).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

	Residual
N	50
Kolmogorov-Smirnov Z	.773
Asymp. Sig. (2-tailed)	.589

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,589. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata sebesar 5% (0,589 > 0,05) sehingga dapat dibuktikan bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai *tolerance*.

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

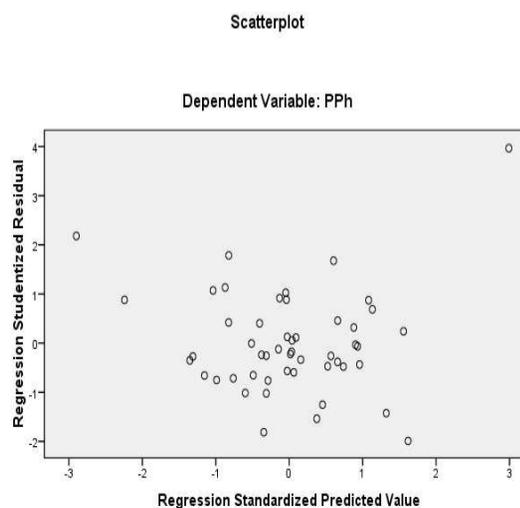
Variabel	Tol.	VIF
Inflasi	.953	1.049
Pemeriksaan_Pjk	.974	1.027
WP	.977	1.023

Sumber: Data diolah (2016)

Diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel terbebas dari masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat berdasarkan grafik *scatterplots*. Hasil dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



**Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: data diolah (2016)

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dilihat bahwa data menyebar abstrak tanpa membentuk pola yang jelas dan persebaran data berada diatas maupun dibawah nilai 0 pada sumbu Y. Hasil ini menunjukkan bahwa data penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Durbin-Watson.

**Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1,891

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,891. Hasil tersebut berada diatas nilai dU yang berdasarkan tabel Durbin-Watson N=50, K=3 sebesar 1,674 dan dibawah nilai 4-dU (4-1,674=2,326). Hasil ini menunjukkan bahwa nilai  $dU < d < 4-dU$  sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Standarisasi	t sig.	Ket.
	B		
X1	-0,159	.234	Tidak Signifikan
X2	.273	.042	Signifikan
X3	.323	.017	Signifikan
Adjust R Square	0,190		
F Hitung	4,829		
F sig.	0,005		
N	50		

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,159 + 0,273 + 0,323 + e$$

1. Koefisien regresi variabel inflasi sebesar -0,159 dinyatakan apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,159 satuan dan berlaku sebaliknya dengan asumsi

bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan.

2. Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,273 dinyatakan apabila pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,273 satuan dan berlaku sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan.
3. Koefisien regresi variabel jumlah wajib pajak sebesar 0,323 dinyatakan apabila jumlah wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,323 satuan dan berlaku sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan.

**Uji Hipotesis**

1. Uji F

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 5% ( $0,005 \leq 0,05$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_1$  dapat diterima yaitu inflasi, pemeriksaan pajak, dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Uji t

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui hasil sebagai berikut:

- a. Inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,234 dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% ( $0,234 \geq 0,05$ ).  $H_2$  ditolak yang menyatakan variabel inflasi inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- b. Pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% ( $0,042 \leq 0,05$ ).  $H_2$  diterima yang menyatakan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- c. Jumlah wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% ( $0,017 \leq 0,05$ ).  $H_2$  diterima yang menyatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### 3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai *R Square* yang telah disesuaikan dengan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* karena pada nilai *adjusted R<sup>2</sup>* apabila terjadi penambahan setiap variabelnya dapat meningkatkan maupun menurunkan kemampuan tergantung dari hasil masing-masing variabel bebas sehingga nilainya sebesar 0,190 (Ghozali, 2013:100). Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas yaitu inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak mampu menerangkan sebesar 19% dari variasi variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan sisanya sebesar 81% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada diluar model penelitian ini.

### Interpretasi Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh Simultan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata 5% ( $0,005 \leq 0,05$ ). Hasil ini menjelaskan bahwa perubahan pada setiap variabel bebas secara bersama-sama merupakan salah satu faktor penentu yang dapat menjelaskan keragaman atau perubahan penerimaan pajak penghasilan.

Keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena penerimaan pajak penghasilan ditentukan berdasarkan faktor internal yang berupa kebijakan fiskal maupun faktor eksternal yang berupa perubahan asumsi ekonomi makro seperti yang ditunjukkan pada variabel inflasi yang fluktuatif.

#### 2. Pengaruh Variabel Inflasi

Berdasarkan hasil pengujian, variabel inflasi menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf nyata 5% ( $0,234 \geq 0,05$ ) yang berarti inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, koefisien variabel inflasi sebesar -0,159 satuan menunjukkan bahwa inflasi dan penerimaan pajak penghasilan memiliki arah hubungan yang negatif.

Inflasi yang tidak berpengaruh signifikan ini dikarenakan perkembangan inflasi di Kota Malang selama 5 tahun terakhir cenderung stabil. Tingkat inflasi Kota Malang selama 5 tahun terakhir berkisar pada nilai 6% hingga 8% yang berdasarkan tingkat keparahannya termasuk

dalam kategori inflasi ringan (Natsir, 2014:255). Secara teori, inflasi juga memiliki arah hubungan yang negatif seperti yang dinyatakan dalam teori Keynes.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nasution dkk. (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Agbeybe et al (2006) dan Ferdiawan (2015).

#### 3. Pengaruh Variabel Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikansi yang kecil dari taraf nyata 5% ( $0,042 \leq 0,05$ ) yang berarti pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, koefisien variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,273 satuan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan memiliki arah hubungan yang positif.

Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak benar sebagai bagian dari intensifikasi perpajakan. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010:247).

Hasil penelitian mendukung penelitian Febriyanti (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Nasution dkk. (2013), Fajar dkk. (2014) dan Anti (2014).

#### 4. Pengaruh Variabel Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel jumlah wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi yang kecil dari taraf nyata 5% ( $0,017 \leq 0,05$ ) yang berarti jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, koefisien variabel jumlah wajib pajak sebesar 0,323 satuan menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan memiliki arah hubungan yang positif.

Pengaruh jumlah wajib pajak yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap adanya penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang membayar pajaknya. Penambahan wajib pajak ini berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan yang berguna dalam rangka menunjang penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Soemitro dalam Rahayu, 2010:90).

Hasil penelitian mendukung penelitian Anti (2014) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Nasution dkk. (2013).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Variabel Inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.
2. Variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.
3. Variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.
4. Variabel Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, peneliti menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi pemerintah sebaiknya perlu memperhatikan perkembangan ekonomi makro yang terjadi seperti inflasi. Pemerintah diharapkan dapat menjaga Indeks Harga Konsumen sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan dalam kategori inflasi rendah, yaitu dengan cara mengawasi harga-harga yang cenderung naik pada periode tertentu dan menelusuri jumlah persediaan kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga tidak

terjadi penyelundupan yang biasa dilakukan oleh pedagang untuk meningkatkan harga kebutuhan tertentu.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam merumuskan kebijakan pajak dalam bidang pemeriksaan, khususnya pada tahun 2016 karena pemerintah telah mencanangkan sebagai Tahun Penegakan Hukum.
3. Bagi pemerintah sebaiknya menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak karena wajib pajak merupakan suatu elemen terpenting dalam menyumbang penerimaan pajak penghasilan seperti memperluas basis pajak, kegiatan penyisiran (*canvassing*) yang dilakukan secara intensif dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode waktu lebih dari 5 tahun sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan menganalisis kondisi-kondisi lain di luar tahun penelitian ini, sekaligus menambah faktor-faktor lain diluar penelitian ini karena masih banyak potensi lain yang menjadi faktor penentu dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan seperti variabel ekonomi makro lainnya yaitu nilai kurs dan suku bunga, tindakan intensifikasi perpajakan lainnya yaitu penagihan pajak, begitu pula tindakan ekstensifikasi perpajakan lainnya yaitu penyuluhan terhadap wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Dokumen Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 2015. *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Utara*.
- Bank Indonesia. 2015. *Pengenalan Inflasi*, diakses pada Tanggal 9 September 2015 dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Mau Tax Ratio Naik? Belajarlah dari Mancanegara!* diakses pada Tanggal 8 September 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/mau-tax-ratio-naik-belajarlah-dari-mancanegara>.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010-2015*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nasution, Rachmat Husein dkk. 2013. *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Studi pada Kota Padang*. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putong, Iskandar. 2009. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjutak, Timbul dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tresno dkk. 2011. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.